

ARTIKEL

**PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DALAM PERSPEKTIF UU NO 32
TAHUN 2009 DI DESA BULU-BULU KECAMATAN TONRA
KABUPATEN BONE**

***PRESERVATION OF MANGROVE FORESTS IN THE PERSPECTIVE OF
LAW NUMBER 32 YEAR 2009 IN BULU-BULU VILLAGE OF TONRA
SUBDISTRICT IN BONEDISTRICT***

MUHAMMAD KHADAFI IDRUS



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2018**



PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DALAM PERSPEKTIF UU NO 32 TAHUN 2009 DI DESA BULU-BULU KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE

MUHAMMAD KHADAFI IDRUS

Pendidikan IPS Kekhususan Pendidikan Hukum Dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar
Email: Muhkhadafi1992@gmail.com

ABSTRAK

Hutan mangrove adalah salah satu bagiandari lingkungan yang berfungsi imenjaga keseimbangan ekosistem agar menjalankan fungsinya dengan baik Namun perubahan iklim yang tidak menentu, menipisnya lapisan ozon dan polusi udara membuktikan adanya kerusakan lingkungan khususnya Hutan Mangrove, Sehingga diperlukan Pelestarian hutan mangrove melalui partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi, Reboisasi dan pengawasan terhadap pelestarian hutan mangrove, faktor-faktor penghambat pelestarian hutan mangrove dan untuk menganalisis dan upaya-upaya pelestarian hutan mangrove. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk Partisipasi masyarakat yaitu : a) *Konservasi* (Pemeliharaan) yakni disekitar tambak dan belum mengoptimalkan lahan yang ada dipinggir laut; b) *Reboisasi* (Penanaman Kembali) yakni di tempat pengairan tambak yang berguna menjaga petakan tambak agar tidak rusak; c) Pengawasan hutan mangrove dilakukan hanya berdekatan dengan tambak masing-masing; (2) Faktor-faktor yang menghambat pelestarian hutan mangrove yaitu: a) kesadaran masyarakat yang rendah; b) Hutan mangrove di konversi menjadi tambak tradisional; c) Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang NO 32 Tahun 2009 yang masih kurang d) kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tentang pentingnya menjaga dan melestarikan kehidupan Primer dipantai; (3) upaya-upaya pelestarian hutan mangrove diantaranya a) diperlukan Peran serta masyarakat dalam menjaga hutan mangrove b) pemberian izin untuk mengelola tambak tradisional perlu untuk diperketat; c) Penegakan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi d) Pemberdayaan kelompok masyarakat Pecinta lingkungan

Kata Kunci: Pelestarian dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

ABSTRACT

Mangrove forest is one part of the environment that serves to maintain the balance of ecosystems in order to carry out its function properly. But the uncertain climate change, the depletion of the ozone layer and air pollution proves the existence of environmental damage, especially Mangrove Forest, thus required Conservation of mangrove forest through community participation. This study aims to analyze the forms of community participation in the conservation, reforestation and monitoring of mangrove forest conservation, inhibiting factors for mangrove forest conservation and to analyze and efforts to conserve mangrove forests. This research uses qualitative approach with data collection technique through interview, observation, and documentation. The results of this study indicate that (1) Forms of Community Participation are: a) Conservation (Maintenance) that is around the pond and has not optimize the existing land on the seafront; b) Reforestation (replanting) ie in the ponds are useful to keep the pond ponds are not damaged; c) Monitoring of mangrove forest is conducted only adjacent to each pond; (2) Factors that inhibit the preservation of mangrove forests are: a) low community awareness; b) Mangrove forests converted into traditional ponds; c) Public understanding of Law NO 32 Year 2009 which is still lacking d) lack of socialization from the Bone District Environmental Office on the importance of maintaining and preserving Primary life on the coast; (3) mangrove forest conservation efforts include a) required Community participation in maintaining mangrove forests b) granting permits to manage traditional ponds need to be tightened c) law enforcement by sanction d) empowering community groups Environmentalists

Keywords: Preservation, Law Number 32 Year 2009

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya hutan mangrove adalah tumbuhan berkayu yang hidup digaris pantai yang mempunyai fungsi untuk menjaga ekosistem hayati agar dapat seimbang dan dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup yang lain. Bumi sebagai tempat manusia untuk beraktifitas, membutuhkan lingkungan yang baik untuk tetap bisa bertahan hidup. Terjaganya lingkungan yang baik dan sehat merupakan dambaan setiap manusia disebabkan lingkungan yang terjaga dapat memberikan suasana yang nyaman untuk kelangsungan hidup manusia.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 mengatur bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan dasar tersebut, lingkungan yang baik sudah mendapat jaminan konstitusi.

Ekosistem mangrove sebagaimana ekosistem hutan lainnya memiliki peran sebagai penyerap (rosot) karbondioksida (CO₂) dari udara yang bertebaran akibat hasil dari kendaraan baik beroda dua maupun beroda empat. Selain dari mangrove sebagai paru-paru dunia. Berfungsi sebagai Penyejuk udara, tempat perkembangbiakan makhluk hidup baik ikan, kepiting, dan udang. penahan dari abrasi pantai oleh air laut, sebagai habitat plancton dan benteng penahan dari limbah perumahan yang dibuang ke laut dan banyaknya ekosistem mangrove membantu terciptanya perairan yang baik untuk pertumbuhan karang, dan kualitas air yang baik untuk budidaya rumput laut.

Ketidak adanya keharmonisan ekosistem sudah tampak dalam kehidupan sehari-hari seperti perubahan iklim, sudah semakin menipisnya lapisan ozon sehingga, apabila hal ini terus berlanjut maka akan mengancam kehidupan pada masa yang akan datang.

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki berbagai ciri khas diantaranya adalah kegotong royongan yakni bahu-membahu, berpartisipasi, bersinergi dalam sebuah kegiatan sehingga pekerjaan yang berat akan mudah dikerjakan disebabkan banyaknya masyarakat yang ikut mengambil bagian.

Namun ada kecenderungan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga populasi hutan mangrove akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri sebab hutan mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi pantai, tempat pemijahan ikan dan udang, dan juga sebagai tempat untuk ikan dan udang mencari makanan. Sehingga masyarakat akan mudah untuk mendapatkan ikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diharapkan menjadi dasar hukum pelestarian lingkungan hidup sehingga tetap lestari dan dapat di nikmati secara berkesinambungan. Untuk mengantisipasi dan juga untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan penebangan secara liar dan juga pengesplotasian secara terus menerus yang sangat membahayakan bagi kelangsungan lingkungan untuk tetap eksis dan dapat dinikmati dari generasi-kegenerasi selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut di atas maka menjadi sangat penting meneliti tentang Pelestarian Hutan Mangrove dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi, reboisasi dan pengawasan. menganalisis faktor-faktor penghambat pelestarian hutan mangrove dalam konservasi, reboisasi dan pengawasan dan menganalisis bagaimana upaya-upaya dalam pelestarian hutan mangrove dalam konservasi, reboisasi dan pengawasan di Desa Bulu-Bulu.

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Partisipasi

Budaya gotong royong adalah suatu bangunan sosial yang memiliki karakteristik masyarakat bangsa yang spesifik, yang hidup di negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga karakteristik gotong royong cenderung mewarnai masyarakat kepulauan. “istilah gotong royong (Bangunjiwo 2009: 234) adalah sifat dasar bangsa Indonesia. Bahwa gotong royong sudah ada sejak zaman pra sejarah di bumi Indonesia. Sejak kecil kita sudah diberikan doktrin bahwa gotong royong adalah sifat dasar bangsa Indonesia dan

menjadi unggulan bangsa ini yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.”

B. Partisipasi sosial dalam perlindungan hutan mangrove

Partisipasi adalah salah satu elemen penting dari pelestarian lingkungan yang berarti mengambil bagian baik meliputi, perencanaan, Reboisasi dan juga pengawasan hal ini partisipasi bukan hanya pada masyarakat pesisir tetapi juga oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Emil Salim (2010:152) dalam kaitan inilah peranan “pembangunan sosial” agar sumber daya pembangunan tidak hanya tertuju pada memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas” tetapi nilai-nilai pranata sosial mesti dikembangkan untuk menumbuhkan solidaritas dan keakraban sosial guna menghindari tumbuhnya jurang ketimpangan yang besar antara kebutuhan mereka yang mampu dan yang tidak mampu.

C. Partisipasi dalam perspektif UU NO 32 Tahun 2009

Sebagaimana lazimnya sebuah negara hukum maka Undang-Undang adalah salah satu hal yang terpenting untuk sebuah kepastian hukum. Supaya tercipta keserasian, keamanan diantara kehidupan ekosistem makhluk hidup. sehingga tetap lestari dari waktu ke waktu. Menurut Suriansyah (2012:1) bahwa “kepastian hukum itu merupakan suatu upaya perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan para pencari keadilan (*justitiabellen*) yang menerima perlakuan sewenang-wenang dari pihak lain. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang tertip. *Ibi ius incertum, ibi ius nullum* (apabila hukum tidak pasti berarti tidak ada hukum)”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan Bab tersendiri tentang peran masyarakat. Hal ini, untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat luas supaya ikut berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. mengenai peran masyarakat diatur dalam Pasal 70 ayat 1:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan adalah suatu yang tidak bisa dilepaskan dari adanya sifat kerjasama yang telah dianut turun temurun

oleh masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa partisipasi adalah sifat dasar bangsa Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 ayat 2.

2. Peran masyarakat dapat berupa:

- “ a) Pengawasan sosial;
- b). Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan
- c). Penyampaian informasi dan atau laporan”

Pengawasan sosial akan memberikan sarana yang efektif dalam pelestarian hutan mangrove disebabkan bahwa masyarakat merasa bahwa hutan mangrove adalah bagian dari lingkungan yang memiliki banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena dan pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan Pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif (Yusuf, 2014: 329) merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yakni yang pertama di Desa Bulu-Bulu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi, reboisasi dan pengawasan, faktor penghambat pelestarian hutan mangrove dan upaya pelestarian hutan mangrove.

D. Sumber Data

Data primer bersumber dari penambang ikan dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup data sekunder bersumber dari data yang berupa dokumen, literatur-literatur dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan alat pengumpulan

data yakni pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan, observasi dan dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Observasi (Pengamatan) dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi riil lokasi yang menjadi obyek penelitian. Sebagai alat bantu dalam observasi digunakanlah catatan dokumentasi dan kamera. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data khususnya data primer, sehingga peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Data yang paling penting untuk menganalisis masalah penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove. Sebagai alat bantu dalam wawancara digunakanlah pedoman wawancara dan alat perekam.

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data selain dari wawancara dan observasi mengenai kondisi di lapangan tempat penelitian yakni di Desa Bulu-Bulu yang berupa foto atau gambar.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif (Zuriah, 2009: 217) adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.

Aktivitas dalam analisis data (Sugiyono, 2010: 91), yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Data Reduction (Reduksi Data).

Mereduksi data (Sugiyono, 2010: 92) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data).

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2010: 95).

3. Conclusion Drawing/Verification.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010: 99) adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, dilakukan dengan teknik perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi data.

1. Perpanjangan pengamatan

Teknik perpanjangan pengamatan yakni peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Apabila data yang ditemukan sebelumnya belum lengkap.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sehingga ditemukan hal yang relevan dengan kepentingan penelitian. dengan perkataan lain, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang dalam situasi yang sangat relevan dengan masalah yang sedang dicari dan kemudian memusatkan pada diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini (Sugiyono, 2010: 125) diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Triangulasi data.

Triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (*crosscheck*). Peneliti akan mengadakan penilaian dengan membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dan dokumentasi dengan data hasil wawancara, mencocokkan kesesuaian atau kebenaran data yang diberikan informan satu dengan informan

lainnya (*recheck*) yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik serta menggunakan bahan referensi berupa kelengkapan foto-foto penelitian.

2. Triangulasi pengamatan/observasi.

Triangulasi pengamatan/observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap objek kajian yaitu pengamatan terhadap tambak, tumbuhan mangrove yang ada dipinggir laut dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan tanaman mangrove.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sesuai yang telah dilaksanakan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai instrument untuk melakukan penelitian. Instrumen ini dilaksanakan secara bersamaan, meskipun bila ada data yang tidak terungkap melalui wawancara maka diperkuat melalui observasi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di bulan Februari sampai dengan Maret. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove dalam konservasi, Reboisasi dan Pengawasan.

a. konservasi hutan mangrove

Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat Desa Bulu-Bulu Khususnya penambak Ikan bahwa bentuk pemeliharaan yang dilakukan adalah sebagai berikut.: Bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan mangrove dalam hal ini konservasi yakni pembibitan dengan mengambil buah dari pohon mangrove atau yang terjatuh dari pohon dan kemudian ditanamkan ditanah.

lahan yang ada disekitar tambak untuk ditanami dikarenakan hutan mangrove bisa untuk memberikan perlindungan terhadap ikan karena ikan pada waktu pasang akan pergi dipinggir laut untuk bernaung dari sinar matahari dan juga untuk mencari makan.

b. Partisipasi masyarakat dalam reboisasi (Penanaman)

Dengan adanya hutan mangrove yang di tanam maka akan pasti memberikan manfaat bagi para petambak disebabkan hutan

mangrove yang memiliki fungsi untuk menahan petakan ombak dari serangan air pasang air laut. dan juga semestinya masyarakat semua menanam hutan mangrove agar bisa mendapatkan manfaat yang besar dikemudian hari secara terus menerus.

Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa cara menanam hutan mangrove yang baik adalah yang dekat dengan induknya karena kalau tidak menanam dekat induknya biasanya hutan mangrove tidak bisa hidup dalam artian bisa mati.

Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa untuk melestarikan hutan mangrove yaitu bisa dengan menanam kembali hutan mangrove sedikit demi sedikit karena hutan mangrove sudah semakin hari semakin sedikit populasinya. Sehingga hutan mangrove menjadi hijau kembali.

c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan yakni mereka yang sengaja menanam dipinggir laut untuk menjaga ombak yang lebih deras dengan hal tersebut karena tambak berada dipinggir laut sehingga mereka menjaga apabila ada yang mengambilnya maka akan di marahi oleh masyarakat yang tambaknya dipinggir laut. Namun bisa mengawasi secara meluas karena keterbatasan waktu.

Masyarakat yang mengambil mangrove sebagai kayu bakar adalah sudah menjadi hal yang biasa karena manfaat hutan mangrove adalah salah satunya sebagai kayu bakar namun, terkadang hal ini dilakukan oleh orang tua sehingga jika diambil secara terus menerus tanpa ada penanaman dan pengawasan maka setiap hari akan turun jumlah populasinya

Masyarakat melakukan pengawasan apabila ada lokasi tambaknya dipinggir laut, dan dekat dengan tambaknya dan jarak yang cukup jauh membuat pemerintah sulit untuk mengawasi karena provinsi dengan daerah.

2. Factor-Faktor yang menghambat pelestarian hutan mangrove

a. kurangnya kesadaran masyarakat.

Semakin berkurangnya hutan mangrove akibat sebagian masyarakat Desa Bulu-Bulu hanya menganggap bahwa hutan mangrove adalah sebagai penahan abrasi pantai sehingga dengan adanya hal tersebut membuat masyarakat menebang dan menyisahkan tumbuhan mangrove di area sekitar tambaknya saja.

Pada umumnya masyarakat selaku penambak ikan di Desa Bulu-Bulu bahwa fungsi hutan mangrove adalah untuk menahan abrasi pantai dan menguatkan petakan tambak agar tidak cepat tergusur oleh ombak sehingga dengan adanya hutan mangrove menjadi bagus untuk kedepannya.

Hutan mangrove adalah tempat berlindung banyak hewan-hewan seperti burung, monyet, ikan, kepiting dan lain-lain tetapi kian hari semakin menurun jumlah populasinya karena masyarakat sebahagian menggunakan kayu mangrove untuk dijadikan kayu bakar. Karena masyarakat apabila pulang dari aktifitas bekerja maka akan mengambil hutan mangrove karena kurang kurang sadarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat dan kurang memahami manfaat yang diberikan oleh hutan mangrove.

Selain dari itu adalah penangkapan ikan dan kepiting menggunakan pukot dan Bubu,. Penangkapan ikan dengan menggunakan pukot di pinggir mangrove dapat merusak hutan mangrove karena pukot terhalang oleh kayu mangrove oleh sebab itu, hutan mangrove bisa terpotong karena belum kuat ketika berbenturan dengan tumbuhan yang masih kecil dan uratnya belum kuat.

b. Kawasan Hutan mangrove *dikonversi* menjadi tambak

Konversi hutan mangrove menjadi tambak dilakukan dengan masyarakat yang ada di Desa Bulu-Bulu mengatakan bahwa manfaat ekonomi yang didapatkan melalui Tambak lebih besar daripada hutan mangrove itu sendiri, hal ini membuat masyarakat pesisir berbondong-bondong dengan masyarakat yang lain dengan cara menebang hutan mangrove dengan sejumlah daerah tertentu sehingga hutan mangrove kian hari semakin menipis dari pinggiran air laut menjadi sekian meter dari tambak.

Pada umumnya masyarakat tambak lebih menguntungkan dari mangrove karena dengan adanya tambak ikan maka masyarakat mendapatkan penghasilan ikan yang beratnya 4 persatu kilo di hargai 17.500 ikan yang naik 3 perkilo harganya 18.000 dan ikan yang beratnya 5 perkilo harganya 15.500 sehingga dengan adanya kenaikan ikan khususnya di bulan-bulan ramadhan maka pemilik tambak akan memanen ikannya untuk di jual. Kurangnya sosialisasi dari dinas lingkungan hidup.

selain dari itu, keuntungan yang diberikan oleh tambak yang berupa ikan bandeng tatapi juga oleh udang putih yang bisa memberikan pendapatan yang lebih kepada masyarakat yang profesinya sebagai penambak ikan dan semua informan penambak ikan yang di wawancara sepakat akan hal itu.

c. Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang masih rendah

Salah satu yang menghambat pelestarian hutan mangrove adalah karena masyarakat kurang mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pasal 70 ayat 1 dan 2 untuk melindungi lingkungan khususnya pelestarian hutan mangrove.

Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena belum mengetahui akan peraturan tersebut karena selama ini tidak ada yang memberikan sosialisasi misalnya dari pemerintah bahwa ada peraturan seperti itu sehingga saya tidak mengetahui peraturan tersebut.

Pada umumnya masyarakat yang melakukan penanaman hutan mangrove selain dari manfaat untuk menjaga dari abrasi pantai dan penahan ombak juga disebabkan adanya salah seorang warga masyarakat yang menanam hutan mangrove dipinggir tambak sehingga berdampak baik untuk Udang dan juga baik untuk kondisi air tambak sehingga menjadi sejuk.

d. Kurangnya penyuluh oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kurangnya penyuluh oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan hambatan untuk melestarikan hutan mangrove karena masyarakat sebahagian tidak mengetahui manfaat hutan mangrove dan mudarat yang ditimbulkan apabila kekurangan hutan mangrove di sekitar pantai.

Pada umumnya masyarakat penambak ikan yang mengatakan bahwa jarak yang cukup jauh perjalanan untuk mencapai hutan mangrove karena tanaman mangrove tumbuh di sekitar rawa atau pantai. Sehingga penyuluh kadang tak melihat pengrusakan hutan mangrove di sebrang lautan sehingga pengawasan menjadi tidak optimal dan penyuluhan tidak tetap.

Kurangnya penyuluh tentang mangrove karena didalam peraturan Dinas lingkungan

hidup sudah tidak ada dilaut hal ini sehingga hal ini perlu diperlukan upaya dan upaya dalam hal ini dari masyarakat untuk melakukan partisipasi masyarakat.

Masyarakat di Desa Bulu-Bulu yang melakukan hal demikian adalah orang tua dan jarang sekali anak muda untuk merusak hutan mangrove sehingga menjadi susah untuk dinasehati. Oleh sebab itu perlu ada dari pihak pemerintah untuk memimpin sekaligus mengarahkan atau memberikan efek jera atau menimal menasihati orang tua yang ada di masyarakat.

3. Upaya pelestarian hutan mangrove.

Upaya adalah suatu ikhtiar untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan aktifnya dinas pemerintahan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat agar mampu untuk bisa juga mengetahui manfaat hutan mangrove agar tetap lestari.

- a. Peran serta masyarakat dalam menjaga hutan mangrove

Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan mangrove adalah karena masyarakat adalah yang dekat dengan hutan mangrove karena itu masyarakat perlu untuk menjaga hutan mangrove agar tetap lestari. Umumnya untuk upaya dalam menjaga hutan mangrove menurut saya adalah adanya kerjasama antara setiap warga masyarakat khususnya yang mempunyai tambak ikan karena apabila hutan mangrove tidak ada maka akan mengakibatkan abrasi pantai dan juga petakan tambak akan rusak yang bukan hanya pesisir yang akan mendapatkan dampaknya namun juga kita yang jauh dari laut

- b. Pemberian izin mengelola tambak Tradisional di perketat

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga hutan mangrove tidak bisa berperan banyak karena personil terbatas dan juga aturan telah membatasi dalam bergerak misalnya dalam memberikan bibit hutan mangrove kepada masyarakat dengan Undang-Undang NO 23 Tahun 2014 tidak ada lagi dan juga kewenangan dinas lingkungan hidup hanya didarat saja Kewenangan Daerah Provinsi di Laut menurut Bapak Jamaluddin Berdasarkan pasal Pasal 27 yaitu:

- “(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

- (2). Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara”.

Masyarakat membuat tambak di pinggir hutan mangrove berdasarkan atas kemauan masyarakat tersebut melakukan pembuatan tambak secara tradisional dengan cara menebang hutan mangrove tanpa ada pengawasan dari pemerintah dan masyarakat karena menganggap bahwa hutan mangrove tidak ada yang punya, selain itu, tidak ada yang keberatan atas pembuatan tambak tersebut.

- c. Penegakan hukum lingkungan dengan Pemberian sanksi

Dinas lingkungan hidup “Kurangya lagi pengawasan/ intervensi dari dinas lingkungan hidup dengan adanya Undang-undangan Nomor 32 Tahun 2014 menyebabkan pembibitan tidak ada lagi setelah itu di daerah kecamatan kajuara selaku hutan mangrove binaan kami ada peraturan desa yang apabila menebang harus mengganti dengan yang lain.

Ditempat binaan Dinas Lingkungan Hidup seperti di Kecamatan Kajuara ada peraturan desa yang apabila menebang maka harus mengganti tiga pohon atau menanam tiga pohon.

- d. Pemberdayaan kelompok masyarakat pecinta lingkungan

Pada dasarnya masyarakat memerlukan Dinas pemerintahan atau yang mewakili pemerintah semestinya memanfaatkan berkumpulnya masyarakat setiap selesai jumatun karena warga masyarakat Desa Bulu-Bulu berada di Masjid sehingga efektif untuk mensosialisasikan perlunya perlindungan lingkungan terkhususnya hutan mangrove yang sudah semakin menipis jumlah populasinya. Dengan memanfaatkan hal tersebut sangatlah efektif di karenakan kita semua berada dimasjid. Tetapi karena tidak ada informasi mengenai perlindungan hutan mangrove maka informasi tidak menjadi efektif padahal kita semua berada disana. Sehingga masyarakat

yang mau untuk menebang tidak jadi untuk menebang.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat akan selalu bertambah dari waktu ke waktu. Sehingga, pemerintah dan masyarakat harus saling bahu membahu dalam mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat khususnya anak muda yang memang betul-betul membutuhkan bantuan. Yakni dengan didirikannya perusahaan seperti perusahaan kepiting, Ikan, dan udang sehingga ada potensi untuk mengespor barang jadi seperti ikan, udang, rumput laut dan kepiting karena semuanya pasti membutuhkan barang tersebut misalnya Ikan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka pada bab ini pembahasan hasil penelitian untuk menganalisis lebih lanjut mengenai (1) Bentuk Partisipasi masyarakat dalam konservasi, Reboisasi dan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Bulu-Bulu (2) Faktor yang penghambat partisipasi masyarakat dalam konservasi, Reboisasi dan pengawasan pelestarian hutan mangrove di Desa Bulu-Bulu (3) Bagaimana upaya-upaya dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Bulu-Bulu.

1. Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove dalam konservasi, Reboisasi dan pengawasan menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009

a. Partisipasi dalam konservasi (Pemeliharaan)

Bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dalam pemeliharaan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu (a). Perlindungan sumber daya alam (b). Pengawetan sumber daya alam (c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

1) Perlindungan sumber daya alam

Bentuk perlindungan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat khususnya tumbuhan mangrove yakni menggunakan buah mangrove yang biasanya jatuh di air, diambil dari pohonya atau memungut buah hutan mangrove yang dibawa oleh air pasang surut air laut. selain mudah didapatkan, juga bisa dengan mudah ditancapkan dipinggir laut. Selain itu, bibit yang biasanya disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone sudah sangat minim disebkan bahwa kewenangan yang ada di laut

semuanya sudah diambil kepada Provinsi Sulawesi Selatan.

2) Pengawetan Sumber daya alam

Pengawetan sumber daya alam adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya. Menjaga keaslian hutan mangrove yang ada dipinggir laut diperlukan adanya tempat sebagai kawasan suaka alam baik untuk perairan laut, pesisir, dan hutan mangrove.

Tempat kawasan hutan mangrove hanya ada di bibir pantai dan luasnya hanya berkisar tiga hektar sehingga hutan mangrove yang seharusnya bisa lebih banyak belum terlalu diperhatikan oleh masyarakat karena menganggap bahwa hutan mangrove tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap masyarakat perekonomian masyarakat di Desa Bulu-Bulu.

3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Hutan mangrove adalah hutan yang memiliki banyak manfaat namun belum di optimalkan dengan baik seperti Fungsi Fisik, Fungsi kimia, fungsi biologi, sebagai kawasan pemijah, fungsi ekonomi, fungsi pariwisata dan fungsi sebagai bahan pakan.

- a) Fungsi fisik kawasan mangrove adalah menjaga garis pantai agar tetap stabil, Melindungi pantai dari proses erosi atau abrasi, menahan tiupan angin kencang dan laut ke darat.
- b) Fungsi kimia kawasan mangrove adalah sebagai tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan oksigen, sebagai penyerap karbondioksida yang dihasilkan oleh kendaraan.
- c) Fungsi biologi kawasan mangrove adalah Sebagai penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber makanan penting bagi invertebrata kecil pemakan bahan pelapukan (*detritus*), yang kemudian berperan sebagai sumber makanan bagi hewan yang lebih besar.

b. Partisipasi dalam Reboisasi (penanaman)

Reboisasi pada dasarnya adalah penanaman kembali hutan mangrove supaya tetap terpelihara dengan banyaknya hutan mangrove dipinggir laut maka bermanfaat kepada masyarakat itu sendiri sebab bisa mendapatkan ikan, udang, kepiting baik dengan memancing atau pukat, menyiapkan

perangkat kepiting, dan apabila hutan mangrove banyak dan luar maka ikan-ikan yang berada dilaut akan pergi dibawah mangrove untuk berlindung dan juga mencari makanan sehingga masyarakat akan mudah mendapatkan ikan.

Masyarakat dalam menanam hutan mangrove yaitu dengan mengambil buah tumbuhan mangrove kemudian itu di tanam dipinggir tambak dengan harapan petakan tambaknya menjadi kuat. Sehingga, petakan tambaknya tidak mudah di hancurkan oleh banjir dan juga air pasang yang tiba-tiba meluap. Sehingga, Masyarakat dalam menanam hutan mangrove adalah mereka yang sadar akan manfaat hutan mangrove namun masyarakat sebahagian hanya melihat hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai tidak melihat bahwa hutan mangrove adalah tanaman yang bisa berfungsi fisik, sebagai ekowisata, sebagai bahan pakan, dan sebagainya sehingga penanaman pun berkurang.

a. Partisipasi dalam pengawasan.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 ayat 2 tentang peran masyarakat salah satunya adalah Pengawasan sosial yang dipelopori oleh masyarakat itu sendiri untuk menjaga lingkungan agar supaya lingkungan tetap menjalankan fungsinya sebagaimana adanya. Pengawasan sosial akan memberikan sarana yang efektif dalam pelestarian hutan mangrove disebabkan bahwa masyarakat merasa bahwa hutan mangrove adalah bagian dari lingkungan yang memiliki banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

Namun kondisi dilapangan, pengawasan hanya kepada hutan mangrove yang berada disekitar tambaknya begitupun dengan masyarakat yang lain untuk menjadikan hutan mangrove disekitar tambaknya menjadi baik supaya petakan tambaknya tidak mudah longsor atau terkikis disebabkan gelombang laut atau pasang surut air laut. Selain itu masyarakat dalam melakukan pengawasan terhambat oleh sebagian masyarakat yang yang tidak sadar akan manfaat dari lingkungan disebabkan bahwa yang menebang hutan mangrove adalah para orang tua yang semetinya menjadi contoh atau pihak yang dituakan.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelestarian Hutan Mangrove

Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi dilapangan bahwa faktor yang

menghambat pelestarian hutan mangrove antara lain: a) kesadaran masyarakat yang rendah; dan b) Hutan mangrove di konversi menjadi tambak tradisional; c) Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang masih kurang d) kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup

a. kurangnya kesadaran masyarakat

Masalah kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan mangrove dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove berkurang. “Dari segi ‘kesadaran masyarakat’ mayoritas masyarakat Indonesia memiliki kesadaran lingkungan yang rendah sehingga banyak sekali kerusakan yang mereka timbulkan.” Laode M. Syarif : (2010:32-33)

b. Perubahan hutan mangrove menjadi tambak

Perubahan hutan mangrove menjadi tambak adalah factor yang mempunyai andil yang besar dalam kerusakan hutan mangrove dengan adanya tambak sebagai pekerjaan utama sebagian masyarakat Desa Bulu-Bulu telah membuat hutan mangrove juga semakin hari semakin sedikit jumlah populasinya disebabkan hutan mangrove menjadi barang yang kurang berharga dibandingkan dengan tambak. Seperti yang diungkapkan oleh Suparmoko (2012: 12) “bahwa pada dasarnya lingkungan seringkali dihargai terlalu rendah atau sama sekali tidak mempunyai harga karena lingkungan merupakan barang bebas yang tidak memiliki transaksi pasar”.

c. Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang masih kurang

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan membuat masyarakat melakukan penebangan hutan secara sembarangan karena masyarakat Desa Bulu-Bulu tidak mendapatkan sosialisasi dan juga pedoman yang bisa dipakai dalam mengelola hutan mangrove. Dalam hukum lingkungan dikemas dengan adanya larangan bagi perorangan, kelompok orang atau masyarakat dalam melakukan manfaat atas hutan secara liar, membabi-buta, sewenang wenang yang dapat menimbulkan kerusakan hutan sehingga mesti ada efek jera. larangan-larangan tersebut mesti disertai dengan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran yakni perorangan atau kelompok orang (Masyarakat

dan korporasi) yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan mangrove

d. Kurangnya Sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup

Penyuluh merupakan perwakilan dari pemerintah yang memberikan sosialisasi atau saran-saran kepada masyarakat apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga masyarakat mau tidak mau akan melakukan hal yang di sosialisasikan karena untuk kepentingan masyarakat sendiri dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat menginginkan adanya peran pemerintah dalam mensosialisasikan tentang hutan mangrove karena dengan adanya sosialisasi maka akan membuat masyarakat segan dan juga bisa ikut untuk berpartisipasi disebabkan adanya rasa tidak enak dari Dinas Lingkungan Hidup, serta memberikan sosialisasi tentang manfaat dan juga arti pentingnya hutan mangrove dalam lingkungan hidup khususnya dipinggir laut akan membuat masyarakat antusias.

3. Upaya-upaya dalam pelestarian hutan mangrove

Upaya pelestarian hutan mangrove diantaranya: a) diperlukan Peran serta masyarakat, b) pemberian izin untuk mengelola tambak tradisional perlu untuk diperketat, c) Penegakan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi, d) Pemberdayaan kelompok masyarakat Pecinta lingkungan.

a. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan mangrove

Peran masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove adalah hal yang diperlukan karena masyarakatlah yang dekat dengan pesisir hutan mangrove dengan adanya peran masyarakat secara konsisten maka pelestarian hutan mangrove akan lebih baik kedepannya. Walaupun, aturan ada tengah masyarakat namun tidak ada kesadaran bahkan tidak mendukung pelestarian mangrove maka akan membuat hutan mangrove akan turun populasinya hal ini membutuhkan peran masyarakat sebab peran pemerintah dan keterbatasan personilnya tidak mungkin memantau terus menerus menjaga hutan mangrove dua puluh empat jam. Dengan ini peran masyarakat maka akan bisa membuat hutan mangrove menjadi baik karena turun di tambak atau melaut maka ada yang ditanam hutan mangrove.

b. Pemberian Izin untuk pengelolaan tambak Tradisional perlu di perketat

Pemerintah perlu datang kepada masyarakat dengan sosialisasi bahwa jarak antara tambak dan hutan mangrove yang bisa untuk di konversi menjadi tambak adalah sekian meter karena apabila tidak seperti itu maka hutan mangrove makin lama akan semakin terkikis jumlah populasinya. Pemerintah dan masyarakat perlu membuat suatu kesepakatan sebelum menerapkan suatu peraturan karena hal ini menyangkut kepentingan antara manusia dengan alam sehingga tercipta keharmonisan. Masyarakat dapat serta merta mengetahui peraturan yang ada sehingga aplikasinya dapat terlaksana dengan baik dan diterima oleh masyarakat seperti bila menebang suatu pohon maka akan di ganti menjadi lima pohon. Pemerintah perlu juga mengontrol perilaku masyarakat pesisir terhadap pelestarian hutan mangrove karena masyarakat di Desa Bulu-Bulu adalah masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda dan juga tingkat pendidikan yang berbeda dengan adanya kontrol yang baik serta izin yang baik maka hutan mangrove akan tetap terlestarikan.

c. Penegakan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi

Peraturan pada prinsipnya adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan harmonis antar manusia dengan sesamanya dan juga antara manusia dengan lingkungannya. Sehingga apabila ada yang sengaja untuk melakukan penebangan hutan secara sembarangan diberikan sanksi kepada masyarakat tersebut.

Pemberian sanksi kepada masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah berupa teguran kepada masyarakat yang melanggar peraturan hal ini dikarenakan tugas untuk pemberian sanksi adalah tugas PPLH. Selain itu dengan adanya UU NO 23 Tahun 2014 maka dengan itu Dinas Lingkungan Hidup tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap pelanggaran dilaut tetapi pelanggaran yang ada di darat saja sehingga Peran Provinsi dalam memberikan sanksi kepada yang merusak lingkungan mutlak diperlukan.

d. Perlunya pemberdayaan masyarakat pecinta lingkungan

Pemerintah yang juga sekaligus sebagai perwakilan dari negara juga turut andil dalam mensukseskan perkembangbiakan hutan mangrove karena dengan banyaknya hutan

mangrove juga akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Dalam melakukan proses pemberdayaan, pemerintahan harus memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi atau yang dapat menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat tertarik dalam mengikuti proses pelestarian hutan mangrove dan tidak menjadi apatis atau kecil kemungkinan masyarakat untuk untuk terjadi perilaku yang kurang disiplin.

Dalam hal ini, untuk bisa memberikan perlindungan dan pelestarian hutan mangrove maka partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan karena dalam lingkup kawasan Kabupaten Bone yang luas diperlukan penyambung lidah untuk saling berkordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dengan adanya kelompok Pecinta Lingkungan maka lebih mudah kordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan bisa diberikan pelatihan-pelatihan guna untuk bisa saling bersama-sama membangun Desa Bulu-Bulu yang Pro akan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa tentang pelestarian hutan mangrove dalam perspektif UU NO 32 Tahun 2009 di Desa Bulu-Bulu, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove baik dalam konservasi, reboisasi, dan pengawasan yaitu berkisar di sekitar area tambak masing-masing supaya petakan tambaknya menjadi kuat terjaga dari abrasi dan belum mengoptimalkan lahan yang luas yang berada dipinggir pantai untuk di Tanami tumbuhan mangrove.
2. Hambatan pelestarian hutan mangrove yaitu kesadaran masyarakat masih minim akan pelestarian hutan mangrove dan hanya melihat hutan mangrove sebagai penahanan abrasi, pantai tidak melihat potensi bahwa hutan mangrove berfungsi sebagai ekowisata, perkembangan ikan yang ada dilaut, dan juga sebagai bahan pakan sehingga dengan serta merta hutan mangrove dibuat menjadi tambak dengan alasan bahwa dengan adanya tambak maka penghasilan akan jauh meningkat. Dan juga kurangnya sosialisasi dalam pelestarian hutan mangrove dan budaya masyarakat yang menganggap bahwa

pemerintah juga harus meyiapkan dana sehingga masyarakat mau untuk bergerak. Dan pemahaman masyarakat akan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Upaya dalam pelestarian hutan mangrove yaitu dengan adanya keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir karena masyarakat pesisir adalah mereka yang senantiasa berada di sekitar tambak dan hutan mangrove, dengan hal itu masyarakat bisa lebih aktif dalam menjaga lingkungan, memperketat izin tambak secara tradisional, memberikan sanksi apabila terbukti melakukan pengrusakan baik itu secara pidana, perdata maupun administrasi dan selain itu, pemerdayaan masyarakat oleh pemerintah sangat diharapkan partisipasinya dengan cara membuat kelompok pro lingkungan supaya dicatat dalam Dinas Lingkungan Hidup.

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Dalam pelestarian hutan mangrove oleh masyarakat seharusnya bukan hanya memelihara, menanam, mengawasi tumbuhan mangrove di pinggir tambaknya saja. Akan tetapi, di sediakan lingkungan yang khusus secara beramai-ramai untuk saling menjaga dan mengawasi pelestarian hutan mangrove dengan hal itu, hutan mangrove akan terpelihara dengan baik sehingga manfaatnya juga akan kembali kepada masyarakat itu sendiri.
2. Adapun faktor kurangnya kesasaran masyarakat maka diperlukan sosialisasi dimasyarakat akan pentingnya hutan mangrove oleh pemerintah khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga hutan mangrove semakin tinggi tingkat populasinya dan perlunya penegakan hukum oleh pemerintah seperti yang diatur didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 baik itu sanksi Administratif, Perdata dan Pidana sehingga hutan mangrove yang masih

ada tidak lagi secara semena-mena untuk dirusak.

3. Pelestarian hutan mangrove adalah milik bersama bukan hanya pemilik masyarakat yang ada disekitar tambak tetapi juga oleh pemangku kepentingan hal ini agar supaya pelestarian hutan mangrove tetap terpelihara dengan baik dengan cara pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang baik serta pemerintah perlu memberikan sosialisasi khususnya dihari jum'at melalui mimbar di masjid supaya bisa dengan mudah tersampaikan pesan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jiwa, Juru Bangunjiwa 2009. *belajar spritual bersama the thingking general*
Yogyakarta, Jogja: Bangkit Publisher.
- Murhaini, Suriansyah, *Hukum kehutanan penegakan hukum terhadap kejahatan* Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo Yogyakarta.
- Salim, Emil, 2010. *Ratusan bangsa merusak satu bumi* . Jakarta: PT. Gramedia.
- Suparmoko M, Maria Ratnaningsih, 2012 *Ekonomika lingkungan* Yogyakarta, BPFE- Yogyakarta.
- Syarif Laode M. Andri G. Wibisana:2010 *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2015. *Memahami penelitian Kualitatif* , Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zuriah, N. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.